



**PENGUMUMAN**  
**LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA**  
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 12 Maret 2023/Periodik - 2022)

**BIDANG** : EKSEKUTIF  
**LEMBAGA** : BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM  
**UNIT KERJA** : BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI JAWA TENGAH

**I. DATA PRIBADI**

1. Nama : FITRIA NITA WITANTI  
2. Jabatan : KETUA  
3. NHK : 666721

**II. DATA HARTA**

<b>A. TANAH DAN BANGUNAN</b>	Rp.	200.000.000
1. Tanah dan Bangunan Seluas 14 m2/13 m2 di GROBOGAN, WARISAN Rp. 200.000.000		
<b>B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN</b>	Rp.	120.000.000
1. MOBIL, TOYOTA CALYA Tahun 2018, HASIL SENDIRI Rp. 120.000.000		
<b>C. HARTA BERGERAK LAINNYA</b>	Rp.	----
<b>D. SURAT BERHARGA</b>	Rp.	----
<b>E. KAS DAN SETARA KAS</b>	Rp.	11.000.000
<b>F. HARTA LAINNYA</b>	Rp.	----
<b>Sub Total</b>	Rp.	331.000.000
<b>III. HUTANG</b>	Rp.	----
<b>IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)</b>	Rp.	331.000.000

**Catatan:**

- Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari [elhkpn.kpk.go.id](http://elhkpn.kpk.go.id). Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui [elhkpn.kpk.go.id](http://elhkpn.kpk.go.id), serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
- Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.



**PENGUMUMAN**  
**LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA**  
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 1 Februari 2023/Periodik - 2022)

**BIDANG** : EKSEKUTIF  
**LEMBAGA** : BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM  
**UNIT KERJA** : BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI JAWA TENGAH

**I. DATA PRIBADI**

1. Nama : **AGUS PURNAMA**
2. Jabatan : **ANGGOTA**
3. NHK : **667215**

**II. DATA HARTA****A. TANAH DAN BANGUNAN**

Rp. 1.010.000.000

1. Tanah dan Bangunan Seluas 1400 m<sup>2</sup>/120 m<sup>2</sup> di GROBOGAN, WARISAN Rp. 355.000.000
2. Tanah Seluas 1480 m<sup>2</sup> di GROBOGAN, WARISAN Rp. 160.000.000
3. Tanah Seluas 2110 m<sup>2</sup> di GROBOGAN, HASIL SENDIRI Rp. 120.000.000
4. Tanah Seluas 938 m<sup>2</sup> di GROBOGAN, HASIL SENDIRI Rp. 50.000.000
5. Tanah Seluas 3525 m<sup>2</sup> di SRAGEN, WARISAN Rp. 325.000.000

**B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN**

Rp. 263.000.000

1. MOBIL, TOYOTA KIJANG INNOVA Tahun 2015, HASIL SENDIRI Rp. 250.000.000
2. MOTOR, HONDA BEAT Tahun 2013, HASIL SENDIRI Rp. 5.000.000
3. MOTOR, HONDA VARIO 125 Tahun 2015, HASIL SENDIRI Rp. 8.000.000

**C. HARTA BERGERAK LAINNYA**

Rp. 89.000.000

**D. SURAT BERHARGA**

Rp. ----

**E. KAS DAN SETARA KAS**

Rp. 56.450.000

**F. HARTA LAINNYA**

Rp. ----

**Sub Total**

Rp. 1.418.450.000

**III. HUTANG**

Rp. 50.000.000

**IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)**

Rp. 1.368.450.000



1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari [elhkpn.kpk.go.id](http://elhkpn.kpk.go.id). Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui [elhkpn.kpk.go.id](http://elhkpn.kpk.go.id), serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.



**PENGUMUMAN**  
**LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA**  
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 7 Maret 2023/Periodik - 2022)

**BIDANG** : EKSEKUTIF  
**LEMBAGA** : BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM  
**UNIT KERJA** : BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI JAWA TENGAH

**I. DATA PRIBADI**

1. Nama : DESI ARI HARTANTA
2. Jabatan : ANGGOTA
3. NHK : 665393

**II. DATA HARTA**

**A. TANAH DAN BANGUNAN** Rp. 340.000.000

1. Tanah dan Bangunan Seluas 111 m<sup>2</sup>/111 m<sup>2</sup> di GROBOGAN, HASIL SENDIRI Rp. 340.000.000

**B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN** Rp. 215.900.000

1. MOTOR, HONDA BEAT Tahun 2010, HASIL SENDIRI Rp. 3.900.000
2. MOBIL, TOYOTA SEDAN/GRETCOROLA Tahun 1995, HASIL SENDIRI Rp. 39.500.000
3. MOTOR, HONDA SEPEDA MOTOR TRAIL - CRF Tahun 2018, HASIL SENDIRI Rp. 27.500.000
4. MOBIL, TOYOTA AVANZA 1.3 G/MINIBUS Tahun 2018, HASIL SENDIRI Rp. 145.000.000

**C. HARTA BERGERAK LAINNYA** Rp. 11.880.000

**D. SURAT BERHARGA** Rp. ----

**E. KAS DAN SETARA KAS** Rp. 35.827.379

**F. HARTA LAINNYA** Rp. ----

**Sub Total** Rp. 603.607.379

**III. HUTANG** Rp. ----

**IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)** Rp. 603.607.379

Catatan:



1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari [elhkpn.kpk.go.id](http://elhkpn.kpk.go.id). Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui [elhkpn.kpk.go.id](http://elhkpn.kpk.go.id), serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.